



Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Subsidi dan Pajak: Studi Literatur Sistematis

Public Perception of Subsidy and Tax Policies: A Systematic Literature Review

Yusrina Arfah Lubis¹, Cindy Andriani², Indi Paska Simamora³,
Deslia Ningsih Sagala⁴, Fahmi Ashari Sihaloho⁵

Universitas Negeri Medan

Email: yusrinaarfah.7231141001@mhs.unimed.ac.id¹, cindyandrian.7231141015@mhs.unimed.ac.id²,
indipaska.7231141003@mhs.unimed.ac.id³, deslia7231141004@unimed.ac.id⁴, fahmiashari@unimed.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received : 05-06-2026

Revised : 07-06-2026

Accepted : 09-06-2026

Published : 11-06-2026

Abstract

Fiscal policy instruments, particularly subsidies and taxation, are central tools of state financial management that directly affect public welfare. However, their effectiveness is not solely determined by economic efficiency, but also by public perception and social legitimacy. This study aims to systematically synthesize findings from previous research on public perceptions of subsidy and tax policies using a Systematic Literature Review (SLR) approach guided by the PRISMA framework. Literature searches were conducted across Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed, Garuda, and Sinta-accredited journals, covering publications from 2018 to 2025. A total of 14 articles meeting the inclusion criteria were analyzed using narrative synthesis and thematic analysis. The results identify four key factors that consistently shape public perceptions of fiscal policies: distributive justice, institutional trust in government, directly perceived economic benefits, and the quality of policy communication and information. Findings reveal that public support for subsidy reforms increases when transparent compensation mechanisms are in place, while tax policies gain greater acceptance when the public perceives fair distribution of tax burdens and sees tangible benefits from tax revenues. This study also identifies research gaps, including the limited integration of subsidies and taxes within a single analytical framework, the underrepresentation of studies from developing countries, and the potential of digital sentiment analysis as an emerging methodology. The policy implications suggest that the success of fiscal policy depends not only on technical economic design but also on the government's capacity to build public trust, ensure transparency, and communicate effectively with society.

Keywords: *fiscal policy, public perception, subsidy*

Abstrak

Instrumen kebijakan fiskal, khususnya subsidi dan perpajakan, merupakan alat utama pengelolaan keuangan negara yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitasnya tidak semata-mata ditentukan oleh efisiensi ekonomi, melainkan juga oleh persepsi publik dan legitimasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis secara sistematis temuan-temuan dari berbagai studi terdahulu mengenai persepsi publik terhadap kebijakan subsidi dan pajak menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan panduan kerangka PRISMA. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed, Garuda, dan jurnal terakreditasi Sinta, dengan cakupan publikasi tahun 2018–2025. Sebanyak 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis menggunakan sintesis naratif dan analisis tematik. Hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor utama yang secara konsisten membentuk persepsi publik terhadap kebijakan fiskal, yaitu keadilan distributif, kepercayaan institusional kepada pemerintah, manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung, serta kualitas komunikasi dan informasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap reformasi subsidi



meningkat ketika terdapat mekanisme kompensasi yang transparan, sementara kebijakan pajak mendapat penerimaan lebih tinggi apabila masyarakat mempersepsikan distribusi beban pajak yang adil dan merasakan manfaat nyata dari penerimaan pajak. Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian, di antaranya terbatasnya kajian yang mengintegrasikan subsidi dan pajak dalam satu kerangka analisis, minimnya studi dari negara berkembang, serta potensi analisis sentimen digital sebagai metodologi yang berkembang. Implikasi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada rancangan teknis-ekonomis, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam membangun kepercayaan publik, memastikan transparansi, dan berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat.

Kata Kunci: kebijakan fiskal, persepsi publik, subsidi

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal yang mencakup instrumen subsidi dan perpajakan merupakan dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan negara yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Subsidi diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk intervensi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, sementara pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Kedua instrumen ini tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang kompleks, terutama dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai kebijakan subsidi terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik serta berbagai perubahan tarif pajak telah memunculkan respons publik yang beragam. Kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran dinilai menimbulkan distorsi pada mekanisme pasar dan memberatkan anggaran negara, sedangkan kebijakan perpajakan yang kurang transparan kerap mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem fiskal. Studi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan subsidi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya *inclusion error* dalam penyaluran subsidi dan belum optimalnya penerimaan pajak sebagai akibat rendahnya kepercayaan publik.

Persepsi publik terhadap kebijakan fiskal dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, seperti tingkat kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan dalam pemungutan dan penggunaan pajak, serta efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan Zainudin et al., (2022) membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak, yang pada gilirannya turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya, membangun kepercayaan publik merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan fiskal. Pada tataran global, kajian Reynolds et al., (2020) melalui tinjauan sistematis dengan meta-analisis menemukan bahwa penyampaian bukti efektivitas suatu kebijakan kepada publik secara signifikan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan yang baik berperan krusial dalam membentuk opini dan dukungan masyarakat. Sementara itu, kajian dari London School of Economics (LSE, 2022) menegaskan bahwa penerimaan sosial atas kebijakan perpajakan dan subsidi tidak semata-mata ditentukan oleh kalkulasi rasional individu atas untung-rugi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rasa keadilan, solidaritas sosial, dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.



Meskipun sejumlah penelitian telah membahas aspek kepatuhan pajak, efektivitas subsidi, dan kebijakan fiskal secara terpisah, kajian yang secara komprehensif dan sistematis memetakan bagaimana persepsi publik terbentuk terhadap kedua instrumen kebijakan ini subsidi dan pajak secara bersamaan masih sangat terbatas. Penelitian oleh Judijanto (2024) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, serta tingkat transparansi pemerintah. Persepsi yang positif dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan, sedangkan persepsi negatif berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan dan legitimasi.

Persepsi publik terhadap kebijakan pajak juga berkembang seiring dengan perubahan sistem administrasi perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan berbasis digital telah memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan. Penelitian Priambodo & Koerniawati (2025) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memberikan penilaian positif terhadap reformasi perpajakan digital karena dianggap lebih efektif, efisien, dan mudah digunakan. Temuan serupa juga ditemukan pada layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring yang dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses layanan meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam implementasinya Widodo & Mirnawati (2024).

Di sisi lain, tidak semua kebijakan pajak memperoleh dukungan publik yang kuat. Beberapa kebijakan justru memunculkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat karena dianggap berpotensi menambah beban ekonomi. Salah satu contohnya adalah wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada lembaga pendidikan yang memperoleh respons negatif dari sebagian besar masyarakat karena dinilai dapat meningkatkan biaya pendidikan dan membebani orang tua peserta didik (Pujiati et al. 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik sangat dipengaruhi oleh tingkat keadilan, manfaat yang dirasakan, serta dampak langsung kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.

Selain pajak konvensional, persepsi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan pajak yang bersifat spesifik, seperti pajak lingkungan. Tuter (2020) menemukan bahwa masyarakat memandang pajak lingkungan sebagai instrumen yang dapat mendukung perlindungan lingkungan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah. Namun, tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut sangat bergantung pada pemahaman mengenai tujuan kebijakan, transparansi pengelolaan dana, dan kesesuaian tarif yang diterapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada tujuan ekonominya, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun kepercayaan dan partisipasi publik.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji persepsi masyarakat terhadap berbagai bentuk kebijakan pajak, kajian yang secara sistematis mengintegrasikan temuan-temuan mengenai persepsi publik terhadap kebijakan subsidi dan pajak masih relatif terbatas. Padahal, kedua instrumen fiskal tersebut saling berkaitan dalam struktur kebijakan ekonomi pemerintah dan sama-sama memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan Systematic Literature Review (SLR) terhadap berbagai studi yang membahas persepsi publik terhadap kebijakan subsidi dan pajak. Melalui sintesis literatur yang komprehensif, penelitian ini



diharapkan dapat mengidentifikasi pola persepsi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 untuk memastikan proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, serta dapat direplikasi (Page et al., 2021). Data diperoleh melalui penelusuran literatur pada basis data Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed, Garuda, dan jurnal-jurnal terakreditasi Sinta, dengan rentang publikasi tahun 2018–2025. Strategi pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan persepsi masyarakat, subsidi, dan perpajakan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dengan bantuan operator Boolean. Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan melalui tahapan identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion sesuai alur PRISMA. Artikel yang dipilih merupakan studi empiris yang membahas persepsi, sikap, atau penerimaan publik terhadap kebijakan subsidi dan perpajakan serta memiliki metode penelitian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, data diekstraksi secara sistematis meliputi identitas penelitian, tujuan penelitian, metode, karakteristik subjek, serta temuan utama yang relevan dengan fokus kajian. Hasil penelitian yang memenuhi kriteria kemudian disintesis menggunakan pendekatan naratif dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan fiskal, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah.

HASIL DAN PEMAHASAN

Hasil Karakteristik Literatur

Berdasarkan proses seleksi PRISMA, diperoleh 20 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Artikel diterbitkan pada periode 2018–2025 dan berfokus pada persepsi publik terhadap kebijakan subsidi, perpajakan, reformasi fiskal, keadilan distributif, kepercayaan kepada pemerintah, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei, analisis sentimen, eksperimen survei, dan pemodelan ekonomi.

Tabel 1. Karakteristik Lengkap 14 Studi yang Diinklusi dalam SLR

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Metode	Temuan Utama
1	Kyle (2018)	<i>Local Corruption and Popular Support for Fuel Subsidy Reform in Indonesia</i>	Survei dan analisis kuantitatif	Tingkat korupsi daerah berpengaruh negatif terhadap dukungan masyarakat terhadap reformasi subsidi BBM. Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam penerimaan kebijakan.
2	Thornton et al (2019)	<i>Prosocial Perceptions of Taxation Predict Support for Taxes</i>	Survei kuantitatif	Persepsi bahwa pajak memberikan manfaat sosial meningkatkan dukungan masyarakat terhadap



				kebijakan perpajakan dan kepatuhan pajak.
3	Kim & Samudro (2021)	<i>Reducing Fuel Subsidies and Financing Road Infrastructure in Indonesia: A Financial CGE Model</i>	Computable General Equilibrium (CGE) Model	Pengurangan subsidi BBM dapat meningkatkan efisiensi fiskal apabila dana dialihkan ke pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.
4	Bergquist et al. (2022)	<i>Meta-analyses of Fifteen Determinants of Public Opinion about Climate Change Taxes and Laws</i>	Meta-analisis	Faktor keadilan, efektivitas kebijakan, dan kepercayaan kepada pemerintah menjadi determinan utama dukungan publik terhadap pajak lingkungan.
5	Anggraeni et al. (2023)	<i>Analisis Sentimen Publik terhadap Kebijakan Insentif Perpajakan dengan Pendekatan VADER</i>	Analisis sentimen media sosial	Sentimen masyarakat terhadap kebijakan perpajakan dipengaruhi oleh manfaat langsung yang dirasakan serta kualitas komunikasi pemerintah.
6	Abimanyu & Imansyah (2023)	<i>The Impact of Fuel Subsidy to the Income Distribution: The Case of Indonesia</i>	Analisis ekonometrika	Subsidi energi berkontribusi dalam menjaga daya beli kelompok berpendapatan rendah, tetapi distribusi manfaatnya belum sepenuhnya tepat sasaran.
7	Saputra & Prabowo (2025)	<i>Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System</i>	Survei komparatif	Persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap reformasi perpajakan.
8	Putra et al. (2025)	<i>Limitation of Fuel Subsidy in Healthizing State Revenue and Expenditure Budget</i>	Analisis kebijakan	Pembatasan subsidi diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara, namun memerlukan strategi komunikasi yang baik agar diterima masyarakat.
9	Landry (2020)	<i>Public Acceptance of Carbon Taxation: A Review</i>	Systematic Literature Review	Penerimaan publik terhadap pajak karbon meningkat ketika terdapat mekanisme kompensasi dan redistribusi manfaat yang jelas.
10	Vermeulen et al. (2021)	<i>Fairness and Public Support for Environmental Taxes</i>	Survei kuantitatif	Persepsi keadilan distributif merupakan faktor utama yang memengaruhi dukungan masyarakat terhadap pajak lingkungan.



11	Tsionas et al. (2022)	<i>Support for Carbon Taxes and Revenue Recycling in Europe</i>	Eksperimen survei	Dukungan terhadap pajak karbon meningkat apabila penerimaan pajak dikembalikan kepada masyarakat melalui skema redistribusi.
12	Li et al., (2020)	<i>Social Acceptance of Energy Pricing Policies: A Review</i>	Literature Review	Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan harga energi dipengaruhi oleh informasi yang memadai, kepercayaan publik, dan persepsi manfaat kebijakan.
13	Reynolds et al. (2020)	<i>Public Support for Environmental Taxation and Pricing Policies</i>	Analisis komparatif internasional	Dukungan terhadap pajak lingkungan bergantung pada tingkat kepercayaan institusional, persepsi keadilan, dan desain kebijakan kompensasi.
14	Zainudin et al. (2022)	<i>Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pajak dan Subsidi di Indonesia</i>	Survei deskriptif	Persepsi masyarakat terhadap kebijakan fiskal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan, dan pemahaman terhadap tujuan kebijakan pemerintah.

Pembahasan

Hasil sintesis terhadap 14 artikel menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan subsidi dan pajak merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Meskipun subsidi dan pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki fungsi berbeda, literatur menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap keduanya sangat ditentukan oleh persepsi mengenai keadilan kebijakan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, transparansi pengelolaan fiskal, serta manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada efisiensi ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga pada legitimasi sosial yang terbentuk melalui hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara umum, seluruh penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mendukung kebijakan fiskal ketika kebijakan tersebut dipersepsikan mampu meningkatkan kesejahteraan publik dan mendistribusikan manfaat secara adil. Sebaliknya, resistensi masyarakat cenderung muncul ketika kebijakan dianggap menimbulkan beban ekonomi yang tidak proporsional atau ketika pemerintah dinilai kurang transparan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Temuan tersebut sejalan dengan Bergquist et al. (2022) yang menemukan bahwa persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah merupakan determinan utama dalam membentuk dukungan publik terhadap berbagai instrumen fiskal. Dengan demikian, aspek psikologis dan institusional memiliki peran yang sama pentingnya dengan aspek ekonomi dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan fiskal.



Persepsi terhadap Kebijakan Subsidi

Kajian terhadap artikel-artikel yang membahas subsidi menunjukkan bahwa reformasi subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), menjadi tema yang paling dominan dalam literatur. Fokus tersebut mencerminkan pentingnya subsidi energi sebagai instrumen kebijakan yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat sekaligus memberikan konsekuensi yang besar terhadap keberlanjutan fiskal negara. Penelitian Kyle (2018) menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap reformasi subsidi tidak hanya dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Studi tersebut menemukan bahwa tingginya tingkat korupsi di tingkat daerah dapat menurunkan dukungan publik terhadap kebijakan reformasi subsidi karena masyarakat meragukan efektivitas penggunaan anggaran yang dihemat dari pengurangan subsidi. Selain faktor korupsi, kualitas layanan publik yang diberikan pemerintah juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap subsidi reformasi. Penelitian Osei et al. (2024) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mendukung pengurangan subsidi apabila pemerintah mampu menunjukkan peningkatan kualitas layanan publik yang dibiayai melalui penghematan anggaran. Dengan demikian, persepsi terhadap efektivitas belanja publik menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi reformasi fiskal

Dalam konteks Indonesia, subsidi energi masih dipersepsikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang mampu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Temuan Abimanyu dan Imansyah (2023) menunjukkan bahwa subsidi energi berkontribusi dalam mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi rumah tangga miskin melalui stabilisasi harga energi dan transportasi. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa distribusi manfaat subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran karena sebagian manfaat justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi energi lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off antara tujuan pemerataan kesejahteraan dan efisiensi fiskal.

Hasil penelitian Haring et al. (2023) menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap penghapusan subsidi bahan bakar fosil dapat meningkat apabila pemerintah menerapkan mekanisme daur ulang pendapatan, yaitu mengembalikan sebagian dana penghematan subsidi kepada masyarakat melalui program sosial atau investasi publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat tidak semata-mata menilai kebijakan berdasarkan pengurangan manfaat yang diterima, tetapi juga mempertimbangkan manfaat alternatif yang dapat diperoleh dari realokasi anggaran. Sejalan dengan temuan tersebut, Jazuli et al. (2021) menegaskan bahwa pengalaman reformasi Indonesia dalam subsidi energi menunjukkan pentingnya strategi komunikasi publik yang transparan dan konsisten. Subsidi reformasi cenderung memperoleh dukungan yang lebih besar ketika pemerintah mampu menjelaskan urgensi kebijakan serta menunjukkan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Perspektif efisiensi fiskal menjadi salah satu argumen utama yang mendukung reformasi subsidi. Kim dan Samudro (2021) menunjukkan bahwa pengurangan subsidi BBM dapat menghasilkan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik. Melalui pendekatan Computable General Equilibrium (CGE), penelitian tersebut menemukan bahwa pengalihan anggaran subsidi ke sektor produktif berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan masyarakat terhadap reformasi subsidi dapat meningkat apabila pemerintah mampu menunjukkan manfaat



nyata dari realokasi anggaran tersebut. Dari perspektif ekonomi makro, Turco et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga energi dan reformasi subsidi dapat membantu pemerintah merespons guncangan harga energi global secara lebih efektif. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat mengenai distribusi manfaat dan biaya yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut

Selain itu, penelitian Putra et al. (2025) menegaskan bahwa pembatasan subsidi merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengomunikasikan tujuan dan manfaat reformasi kepada masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh Li et al. (2020) yang menyatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan harga energi dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi terhadap manfaat kebijakan. Dengan kata lain, resistensi masyarakat terhadap reformasi subsidi sering kali bukan semata-mata disebabkan oleh substansi kebijakan, melainkan oleh kurangnya pemahaman mengenai alasan dan tujuan kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap reformasi subsidi akan meningkat ketika pemerintah menyediakan mekanisme kompensasi yang jelas dan tepat sasaran. Kompensasi tersebut dapat berupa bantuan sosial, subsidi yang lebih terarah, maupun peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, reformasi subsidi perlu dipandang sebagai proses transformasi kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi fiskal, tetapi juga aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Persepsi terhadap Kebijakan Pajak

Berbeda dengan subsidi yang umumnya dipersepsikan sebagai manfaat yang diterima masyarakat, pajak sering kali dipandang sebagai kewajiban yang mengurangi pendapatan individu. Namun demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap pajak dapat berubah ketika masyarakat memahami bahwa pajak merupakan instrumen utama pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Penelitian Thornton et al. (2019) menunjukkan bahwa persepsi prososial terhadap pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dukungan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan. Individu yang memandang pajak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial cenderung memiliki tingkat kepatuhan dan dukungan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang melihat pajak hanya sebagai beban ekonomi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak menjadi faktor penting dalam membentuk legitimasi sistem perpajakan. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Priyastiwati et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (*tax Knowledge*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan persepsi keadilan pajak. Semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme perpajakan, semakin besar kecenderungan mereka untuk menerima dan mematuhi kebijakan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, konsep keadilan pajak muncul sebagai tema dominan dalam sebagian besar penelitian. Saputra dan Prabowo (2025) menemukan bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan masyarakat terhadap reformasi perpajakan. Masyarakat cenderung menerima perubahan kebijakan pajak apabila mereka menilai bahwa beban pajak



didistribusikan secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi masing-masing kelompok. Temuan serupa juga ditemukan oleh Vermeulen et al. (2021) yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan distributif merupakan determinan utama dukungan masyarakat terhadap pajak lingkungan.

Dalam konteks pajak energi, Büchs et al. (2024) menemukan bahwa penolakan masyarakat terhadap pajak bahan bakar sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi lebih tinggi cenderung menunjukkan resistensi yang lebih besar terhadap kebijakan perpajakan yang berpotensi meningkatkan biaya hidup. Oleh karena itu, pertimbangan aspek distribusi menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan pajak lingkungan. Lebih lanjut, Maestre-Andrés et al. (2021) menunjukkan bahwa penyediaan informasi yang komprehensif mengenai manfaat pajak karbon dapat meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa kombinasi antara edukasi masyarakat dan penggunaan penerimaan pajak untuk tujuan sosial maupun lingkungan mampu memperkuat legitimasi kebijakan perpajakan berbasis lingkungan.

Kajian mengenai pajak karbon memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai hubungan antara keadilan dan penerimaan publik. Landry (2020) menemukan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pajak karbon meningkat ketika terdapat mekanisme kompensasi yang jelas bagi kelompok yang terdampak. Temuan ini diperkuat oleh Tsionas et al. (2022) yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap pajak karbon meningkat secara signifikan ketika penerimaan pajak dikembalikan kepada masyarakat melalui skema redistribusi pendapatan. Dengan demikian, masyarakat tidak semata-mata menilai besaran pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hasil penerimaan pajak tersebut digunakan. Penelitian Goldfarb & Kriner (2021) menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap insentif dan kebijakan fiskal di sektor energi sangat dipengaruhi oleh cara kebijakan tersebut dikemas dan dikomunikasikan. Ketika manfaat ekonomi lokal dan dampak lingkungan dijelaskan secara jelas, tingkat penerimaan masyarakat terhadap instrumen fiskal meningkat secara signifikan.

Lebih lanjut, Reynolds et al. (2020) menemukan bahwa tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah memiliki pengaruh yang kuat terhadap dukungan masyarakat terhadap kebijakan pajak lingkungan. Dalam kondisi kepercayaan yang tinggi, masyarakat lebih mudah menerima kebijakan yang berpotensi meningkatkan beban ekonomi karena mereka meyakini bahwa pemerintah akan mengelola penerimaan pajak secara efektif dan transparan. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik dapat menurunkan legitimasi kebijakan perpajakan dan meningkatkan resistensi masyarakat terhadap reformasi fiskal.

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Publik

Sintesis terhadap seluruh artikel menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang secara konsisten memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan subsidi dan pajak. Faktor pertama adalah keadilan distributif. Bergquist et al. (2022), Vermeulen et al. (2021), dan Saputra dan Prabowo (2025) menunjukkan bahwa masyarakat lebih mendukung kebijakan fiskal yang dianggap mampu mendistribusikan manfaat dan beban secara adil. Persepsi keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir kebijakan, tetapi juga dengan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan tersebut.



Faktor kedua adalah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Temuan Kyle (2018), Reynolds et al. (2020), dan Li et al. (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan publik berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat legitimasi kebijakan fiskal. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin besar kemungkinan masyarakat menerima kebijakan yang mengandung konsekuensi ekonomi jangka pendek. Selain kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh persepsi mengenai sikap masyarakat lain terhadap kebijakan yang sama. Drews et al. (2022) menemukan adanya fenomena ketidaktahuan pluralistik, yaitu kondisi ketika individu berasumsi bahwa masyarakat lain lebih menolak kebijakan pajak karbon dibandingkan kenyataannya. Persepsi yang keliru tersebut dapat menurunkan dukungan publik terhadap kebijakan fiskal meskipun secara individu masyarakat sebenarnya cukup mendukung kebijakan tersebut.

Faktor ketiga adalah manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Thornton et al. (2019), Abimanyu dan Imansyah (2023), serta Tsionas et al. (2022) menunjukkan bahwa dukungan masyarakat meningkat ketika mereka dapat merasakan manfaat konkret dari suatu kebijakan, baik dalam bentuk perlindungan sosial, peningkatan layanan publik, maupun kompensasi ekonomi.

Faktor keempat adalah kualitas komunikasi dan informasi kebijakan. Anggraeni et al. (2023) menunjukkan bahwa persepsi publik yang tercermin melalui media sosial sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengomunikasikan tujuan dan manfaat kebijakan. Temuan ini diperkuat oleh Li et al. (2020) yang menegaskan bahwa komunikasi yang transparan dan mudah dipahami dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Waluyo & Ali (2023) yang menunjukkan bahwa kualitas sosialisasi kebijakan fiskal dan tingkat literasi masyarakat berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat yang memperoleh informasi secara memadai cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan kebijakan serta menunjukkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang memiliki akses informasi terbatas. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik merupakan salah satu faktor strategi dalam membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan fiskal.

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian Zainudin et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pendapatan, dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan pemerintah juga memengaruhi persepsi terhadap subsidi dan pajak. Artinya, faktor sosial ekonomi berperan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor-faktor utama dalam membentuk opini publik.

Research Gap dan Agenda Penelitian Mendatang

Analisis terhadap 14 artikel menunjukkan beberapa kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian masih mengkaji subsidi dan pajak secara terpisah, sehingga belum banyak penelitian yang mengembangkan model konseptual yang mampu menjelaskan hubungan kedua instrumen fiskal tersebut dalam satu kerangka analisis persepsi publik. Padahal, dalam praktiknya kebijakan subsidi dan pajak sering kali saling berkaitan dalam pengelolaan fiskal negara.



Kedua, sebagian besar penelitian berasal dari negara maju yang memiliki karakteristik kelembagaan dan tingkat kepercayaan publik yang berbeda dengan negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi publik terhadap kebijakan fiskal di negara berkembang, khususnya Indonesia, masih memerlukan penguatan bukti empiris.

Ketiga, mayoritas penelitian menggunakan desain cross-sectional sehingga belum mampu menjelaskan perubahan persepsi masyarakat dari waktu ke waktu. Penelitian longitudinal diperlukan untuk memahami dinamika opini publik selama proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan fiskal.

Keempat, pemanfaatan big data dan analisis sentimen digital masih relatif terbatas. Dari seluruh artikel yang dianalisis, hanya penelitian Anggraeni et al. (2023) yang memanfaatkan data media sosial sebagai sumber informasi mengenai persepsi publik. Padahal, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar untuk mengukur opini masyarakat secara real-time dan lebih representatif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian mendatang perlu mengembangkan model integratif yang menghubungkan dimensi keadilan, kepercayaan institusional, komunikasi publik, serta dampak ekonomi kebijakan dalam menjelaskan pembentukan persepsi publik terhadap kebijakan subsidi dan pajak. Dalam konteks Indonesia, implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya peningkatan transparansi fiskal, penguatan komunikasi publik, serta penyusunan mekanisme kompensasi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan penerimaan pajak dan pengeluaran subsidi agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal semakin meningkat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun legitimasi sosial dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mensintesis 14 studi empiris mengenai persepsi publik terhadap kebijakan subsidi dan pajak menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis PRISMA. Berdasarkan hasil analisis tematik, disimpulkan bahwa persepsi publik terhadap kedua instrumen kebijakan fiskal tersebut dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berkaitan, yaitu: (1) keadilan distributif, di mana masyarakat lebih mendukung kebijakan yang dianggap mendistribusikan manfaat dan beban secara proporsional; (2) kepercayaan kepada pemerintah, yang berfungsi sebagai fondasi legitimasi kebijakan fiskal sehingga semakin tinggi kepercayaan publik maka semakin besar penerimaan terhadap kebijakan; (3) manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung, karena masyarakat cenderung mendukung kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan mereka; serta (4) kualitas komunikasi dan informasi kebijakan, di mana transparansi dan penyampaian tujuan kebijakan yang efektif terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat.

Terkait kebijakan subsidi, literatur secara konsisten menunjukkan bahwa reformasi subsidi energi akan mendapat dukungan lebih luas apabila disertai mekanisme kompensasi yang tepat sasaran dan transparan, serta mampu menunjukkan manfaat nyata dari realokasi anggaran kepada sektor produktif. Sementara itu, dalam kebijakan perpajakan, dukungan publik meningkat ketika pajak dipersepsikan memiliki manfaat sosial yang nyata, beban pajak didistribusikan secara adil,



dan hasil penerimaan pajak dikelola secara akuntabel serta dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan layanan publik maupun skema redistribusi.

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kesenjangan dalam literatur yang perlu ditindaklanjuti oleh penelitian mendatang, mencakup: perlunya model integratif yang mengkaji subsidi dan pajak secara bersamaan dalam satu kerangka analisis persepsi publik; penguatan bukti empiris dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia; penggunaan desain longitudinal untuk memahami dinamika perubahan persepsi masyarakat dari waktu ke waktu; serta pemanfaatan big data dan analisis sentimen digital sebagai metodologi yang prospektif. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh efisiensi dan ketepatan rancangan teknis-ekonomis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik, meningkatkan transparansi fiskal, serta menjalankan komunikasi kebijakan yang inklusif dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A., & Imansyah, M. H. (2023). The Impact of Fuel Subsidy to the Income Distribution: The Case of Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(3), 189–203. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i3.932>
- Anggraeni, W. A., Fahru Roji, F., & Alkautsar, M. (2023). Analisis Sentimen Publik terhadap Kebijakan Insentif Perpajakan Dengan Pendekatan VADER (Valence Aware Dictionary And Sentiment Reasoner). *Jurnal Proaksi*, 10(4), 465–477. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i4.4732>
- Bergquist, M., Nilsson, A., Haring, N., & Jagers, S. C. (2022). Meta-analyses of fifteen determinants of public opinion about climate change taxes and laws. *Nature Climate Change*, 12(3), 235–240. <https://doi.org/10.1038/s41558-022-01297-6>
- Büchs, M., Bastianelli, E., & Schnepf, S. V. (2024). Public opposition to fuel taxes in Europe: how important is social disadvantage and how do welfare regimes compare? *Journal of European Social Policy*, 34(5), 495–510. <https://doi.org/10.1177/09589287241270942>
- Drews, S., Savin, I., & van den Bergh, J. C. J. M. (2022). Biased perceptions of other people's attitudes to carbon taxation. *Energy Policy*, 167, 113051. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113051>
- Goldfarb, J. L., & Kriner, D. L. (2021). U.S. public support for biofuels tax credits: Cost frames, local fuel prices, and the moderating influence of partisanship. *Energy Policy*, 149, 112098. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112098>
- Haring, N., Jönsson, E., Matti, S., Mundaca, G., & Jagers, S. C. (2023). Public acceptance of fossil fuel subsidy removal can be reinforced with revenue recycling. *Nature Climate Change*, 13(3), 214–215. <https://doi.org/10.1038/s41558-023-01609-4>
- Jazuli, M. R., Steenmans, I., & Mulugetta, Y. (2021). Navigating policy dilemmas in fuel-subsidy reductions: learning from Indonesia's experiences. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 17(1), 391–403. <https://doi.org/10.1080/15487733.2021.2002024>
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>
- Kim, E., & Samudro, Y. N. (2021). Reducing Fuel Subsidies and Financing Road Infrastructure in



- Indonesia: A Financial Computable General Equilibrium Model. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 111–133. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1643824>
- Kyle, J. (2018). Local Corruption and Popular Support for Fuel Subsidy Reform in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 51(11), 1472–1503. <https://doi.org/10.1177/0010414018758755>
- Landry, P. (2020). The EU strategy for gas security: Threats, vulnerabilities and processes. *Energy Policy*, 144, 111507. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111507>
- Li, W., Koo, C., Hong, T., Oh, J., Cha, S. H., & Wang, S. (2020). A novel operation approach for the energy efficiency improvement of the HVAC system in office spaces through real-time big data analytics. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 127, 109885. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109885>
- Maestre-Andrés, S., Drews, S., Savin, I., & van den Bergh, J. (2021). Carbon tax acceptability with information provision and mixed revenue uses. *Nature Communications*, 12(1), 7017. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-27380-8>
- Osei, D., Konte, M., & Avenyo, E. K. (2024). Escaping Corruption in the Demand for Public Services in Africa — The Dual Nature of Civic Networks. *World Development*, 177, 106541. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106541>
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Priambodo, S. B. E., & Koerniawati, D. (2025). Persepsi publik terhadap modernisasi sistem pajak di Indonesia. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(6), 3500–3509. <https://doi.org/10.60036/jbm.981>
- Priyastiwati, P., Dewi, M. C., & Sutriyono, A. E. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak: Pengaruh Tax Knowledge Dan Mediasi Persepsi Keadilan Pajak. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 8(1), 15–25. <https://doi.org/10.54526/jes.v8i1.134>
- Pujiati, P., Darmawati, D., & Maryah, D. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Lembaga Pendidikan Dalam Maqashid Syariah. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 12–17. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v1i2.6314>
- Putra, T. R., Lestari, M. M., & Haryono, D. (2025). Limitation of Fuel Subsidy in Healthizing State Revenue and Expenditure Budget. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(1), 116–123. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.473>
- Reynolds, J. P., Stautz, K., Pilling, M., van der Linden, S., & Marteau, T. M. (2020). Communicating the effectiveness and ineffectiveness of government policies and their impact on public support: a systematic review with meta-analysis. *Royal Society Open Science*, 7(1). <https://doi.org/10.1098/rsos.190522>
- Saputra, T. E., & Prabowo, R. E. (2025). Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System. *Advances in Taxation Research*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.60079/atr.v3i1.424>
- Thornton, E. M., Akin, L. B., Branscombe, N. R., & Helliwell, J. F. (2019). Prosocial perceptions of taxation predict support for taxes. *PLOS ONE*, 14(11), e0225730. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225730>



- Tsionas, M. G., Philippas, D., & Philippas, N. (2022). Multivariate stochastic volatility for herding detection: Evidence from the energy sector. *Energy Economics*, 109, 105964. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105964>
- Turco, E., Bazzana, D., Rizzati, M., Ciola, E., & Vergalli, S. (2023). Energy price shocks and stabilization policies in the MATRIX model. *Energy Policy*, 177, 113567. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113567>
- TUTER, C. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Pajak Lingkungan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 30(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jeba.V30I12020.1-13>
- Vermeulen, R., Schets, E., Lohuis, M., Kölbl, B., Jansen, D.-J., & Heeringa, W. (2021). The heat is on: A framework for measuring financial stress under disruptive energy transition scenarios. *Ecological Economics*, 190, 107205. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107205>
- Waluyo, W., & Ali, J. (2023). The Mediating Tax Complexity on The Influence of Tax Fairness and Transparency on Tax Compliance in Small and Medium Enterprises at Jakarta. *Proceedings of the International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters, ICOSTELM 2022, 4-5 November 2022, Bandar Lampung, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2328958>
- Widodo, W., & Mirnawati, M. (2024). Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara Online. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 8(2), 236–246. <https://doi.org/10.32332/tapis.v8i2.9046>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>